KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggap pemerintah tidak serius
Tanggal : Selasa, 05 Juni 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Anggap Pemerintah Tidak Serius

Tuntaskan Persoalan Honorer K-2

JAKARTA-Komisi I, II, IV, VIII, IX, X, dan Komisi XI DPR RI menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian. Rapat digelar di Gedung Badan Musyawarah DPR RI, Jakarta yang membahas tenaga honorer. Hasilnya, para wakil rakyat itu mendesak pemerintah untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Dalam rapat gabungan tersebut hadir Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, perwakilan dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Bappenas.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, Utut Adianto dan dibuka pukul 10.50. Dalam agenda itu DPR dan para menteri membahas permasalahan tenaga honorer K2. "Perkenankan kami buka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita kali initunggal yaitu penyelesaian permasalahan tenaga honorer K2," kata Utut membuka rapat, Senin (4/6).

Politisi PDIP itu menuturkan, pertama pemerintah akan menyelesaikan status tenaga kerja honorer kategori K2 yang jumlahnya mencapai 438.590. Adapun tenaga kerja honorer K2 adalah mereka yang diangkat per 1 Januari 2005 namun tidak dibiayai APBN/APBD. "Pemerintah akan menyelesaikan status tenaga honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, sambung Utut, pemerintah dan DPR sepakat akan melakukan Rapat Gabungan lanjutan pada 23 Juli mendatang. Adapun agenda rapat nantinya menyusun tahapan penyelesaian tenaga honorer K2. "Agenda Tahapan Penyelesaikan Tenaga Honorer K-2 dan akan memgundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hodup dan Kehutanan," tuturnya.

Ditambahkan Ketua Komisi X DPR RI, Djoko Udjianto, 438 ribuan honorer K2 ini sudah mengabdi puluhan tahun tanpa status jelas. Mereka teraniaya karena peraturan pemerintah yang membatasi usia untuk diangkat CPNS. "PP 48/2005 dan PP 56/2012 membatasi ruang gerak mereka untuk menjadi PNS. Padahal mereka ini masih terus mengabdi dengan bayaran minim," ucapnya di lokasi yang sama.

Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan menyoroti keseriusan pemerintah. Dari delapan menteri yang diundang hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang hadir. "Kehadiran menteri menjadi tanda keseriusan pemerintah. Kalau perlu Menko harus hadir. Yang dibahas ini masalah anak bangsa juga. Jadi jangan pemerintah

menyepelekannya," tegasnya.

Sementara, Deputi Bidang SDM Aparatur yang mewakili Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dalam rapat ini pihaknya bakal menjelaskan kronologis dan kriteria tenaga honorer. "Sampai sejauh ini yang berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer apa," kata Setiawan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (4/6).

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 dan PP Nomor 56 tahun 2012, disebutkan bahwa tenaga honorer merupakan honorer yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005.

Setiawan menjelaskan, persoalan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya dua peraturan pemerintah tersebut. "Kalau dilihat komposisinya yang terbanyak tenaga administrasi. Secara nasional tenaga administrasi sudah sangat amat berlebih," singkatnya. (aen)

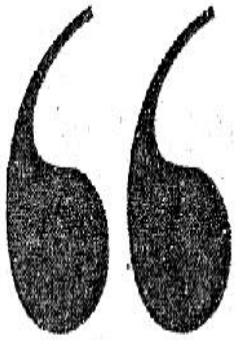

Kehadiran menteri menjadi tanda keseriusan pemerintah. Kalau perlu Menko harus hadir. Yang dibahas ini masalah anak bangsa juga. Jadi jangan pemerintah menyepelekannya."

Syarief Hasan
Anggota Komisi I DPR RI